

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam menjadi tolak ukur perekonomian suatu daerah. Untuk mencapai pembangunan ekonomi dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran pertumbuhan ekonomi di daerah tidak berbeda jauh dengan sistem sasaran pembangunan nasional dilihat dari cakupannya secara keseluruhan. Pembangunan di suatu daerah diperlukan agar masyarakat yang tinggal di sana dapat hidup sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat harus bahu-membahu mengelola sumber daya yang ada di daerah dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak swasta dan daerah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengembangkan perekonomian di daerah tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya telah berganti menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa suatu keseimbangan keuangan daerah dan pusat yang selalu mengandalkan aparat dari pemerintahan, tetapi setiap masyarakat juga harus ikut mensupport pelaksanaan otonomi daerah dengan cara memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Sedangkan untuk hal lain berdasarkan UU No.32 pada Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “setiap pemerintah daerah pasti memiliki kewenangan secara luas untuk dapat mengelola

dan mengatur setiap urusan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah untuk sebuah kepentingan dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat di daerah tersebut”. Dari kedua undang-undang tersebut pada dasarnya membahas mengenai pentingnya pelimpahan otonomi daerah pemerintahan kota atau kabupaten agar setiap pemerintahan daerah mampu berjalan secara mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menentukan kebijakan pembangunan daerahnya.

Menurut Kadir 2019, pembangunan melalui otonomi daerah, dimana suatu kebijakan daerah akan dilaksanakan dan ditekankan pada karakteristik daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan kelembagaan di suatu daerah, oleh sebab itu kunci keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat lebih mudah dicapai dengan sistem desentralisasi. Hal ini terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan kondisi sumberdaya yang berbeda dengan daerah lain, maka setiap pembangunan di setiap daerah pasti akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga pemerintah daerah harus mengerti secara mendalam tentang situasi di setiap wilayah dengan mengumpulkan data dan informasi yang valid dan berharga yang dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang lebih kuat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pengembangan industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor industri pengolahan menjadi penggerak utama di provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat sektor yang mendukung di Kabupaten Sidoarjo yaitu sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan. Di Kabupaten Gresik sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu sektor industri pengolahan dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sedangkan di Kabupaten Lamongan yang mendorong

pertumbuhan ekonomi yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi; sektor Real Estate; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah; Sektor Konstruksi; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Sektor Jasa Lainnya. Pada dasarnya cepat lambatnya sektor – sektor yang ada di setiap daerah memiliki kontribusi terhadap potensi ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap adanya tingkat daya saing di setiap daerahnya tinggi agar dapat membantu sektor – sektor unggul di Provinsi Jawa Timur (Republika, 2021).

Potensi ekonomi yang ada di setiap daerah perlu dimanfaatkan secara efektif guna menunjang pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pengembangan potensi ekonomi atau sektor unggulan di suatu daerah yang memberikan kontribusi terbesar bagi kemajuan daerah tersebut memang menjadi prioritas kebijakan yang harus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi perekonomian disuatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu tolak ukur yang dapat dijadikan rujukan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disuatu wilayah atau daerah tersebut Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Berdasarkan data – data yang didapat maka dapat diperoleh data yang menguatkan penulis untuk melakukan penelitian tentang analisis sektor perekonomian yang mempengaruhi Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan. Dengan adanya data yang menguatkan tentang Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB) seperti di atas maka penulis ingin menganalisis data yang diperoleh dari kantor BPS kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan, sehingga penulis mengambil judul **“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN GRESIK, DAN KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN METODE LQ DAN SHIFT SHARE”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sektor yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan *location quotient* (LQ)?

2. Bagaimanakah sektor yang menyebabkan pergeseran ekonomi di daerah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan *shift-share*?
3. Bagaimanakah sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan *overlay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tujuan yang diharapkan adalah:

1. Mengetahui sektor yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan *location quotient* (LQ).
2. Mengetahui sektor yang menyebabkan pergeseran ekonomi di daerah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan *shift-share*.
3. Mengetahui potensi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan berdasarkan pendekatan *overlay*.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dalam studi ini adalah 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, studi ini memiliki ruang lingkup materi berupa analisis pertumbuhan ekonomi di 3 kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten

Lamongan) sehingga pembatasan hanya dibatasi pada analisis sektor ekonomi di 3 kabupaten di Jawa Timur.

Agar dapat terarah pada pokok permasalahannya digunakan Uji Location Quotient (LQ) dan Uji Shift Share dengan definisi operasional meliputi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan selama tahun 2011-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website resmi Badan Pusat Statistik.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah yang bersangkutan tentang kinerja masing – masing sektor.
3. Memudahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan.